



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DJOHAN AFANDI
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 106184

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 179 m2/30 m2 di MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 483 m2/200 m2 di JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 176 m2/57 m2 di SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 239.000.000

1. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA TIGER SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOBIL, TOYOTA HARDTOP JEEP Tahun 1981, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
5. MOBIL, BMW 318i SEDAN Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
6. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 135.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.328.320.558



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.202.320.558
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.202.320.558

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.